

ANALISIS KINERJA FINANSIAL BUMN PERIKANAN

MIRA

Peneliti Pada Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan,
Departemen Kelautan dan Perikanan
email: miraclenia@yahoo.com

ABSTRACT

The objective of this research is to analyze the financial performance in state own enterprisess of PT Perikanan Nusantara (PT Usaha Mina, PT Perikanan, PT Tirta Raya Mina, and PT Perikanan Samudra Besar. This Research done on 2009 in each branches of PT Perikanan Nusantara. The result show that the cash ratio of PT Perikanan Nusantara is 0.08. The Solvability value, PT Perikanan Nusantara is below 0.53, though minimum standard of that solvability ratio is 1 : 1, in this case cash ratio of PT Perikanan Nusantara is below minimum standard of solvability ratio. , meaning ability of company to pay for debt of estae had ill asorted. Minimum standard (current ratio 0 which ought to is 2 : 1, in this case current ratio of PT Fishery of Nusantara reside in far below the mark minimize current ratio that is only 0.24. Meaning, PT Perikanan Nusantara unable to fulfill obligation short-range him, in the form of fluent debt and long-range debt. Depended to this debt can be seen from side of leverage ratio PT Perikanan Nusantara which equal to 1.88. This number means that the capital of the company is mostly external financing. This suggests that the company depends on the debt, even this company is not stabile yet .

Keywords: Cash Ratio, Leverage Ratio, and Solvability Value.

PENDAHULUAN

BUMN berstatus Persero maupun Perum wajib memberikan kontribusi kepada APBN lewat pajak dan bagian laba untuk pemerintah alias dividen. Khusus untuk BUMN Persero, ada kontribusi lain berupa hasil privatisasi (Abeng, 2002). Mengingat peran BUMN Perikanan cukup strategis dalam mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan serta memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional, maka rendahnya kinerja BUMN tersebut dapat berpengaruh pada perekonomian nasional. Sehubungan dengan kondisi tersebut, diperlukan langkah penyelamatan kinerja BUMN antara lain melalui revitalisasi usaha-usaha BUMN tersebut.

Kinerja BUMN Perikanan dipengaruhi berbagai faktor internal dan eksternal, baik yang sifatnya teknis maupun non teknis. Secara internal, rendahnya kapasitas manajemen ditentukan oleh struktur organisasi, mekanisme kerja, kultur perusahaan dan kemampuan sumberdaya manusia. Disamping itu, belum optimalnya jejaring

dengan pihak eksternal juga mempunyai andil mengurangi kinerja BUMN tersebut. Faktor eksternal yang sangat dirasakan karena munculnya pesaing-pesaing baru dari beberapa negara, contohnya Taiwan dan Filipina.

Menghadapi era perdagangan bebas dalam bentuk globalisasi perekonomian dan liberalisasi perdagangan menuntut BUMN agar memanfaatkan peluang seluas-luasnya untuk mengembangkan usahanya sehingga menjadi Badan Usaha yang maju dan mandiri (Bastian, 2002). Untuk mewujudkan tuntutan tersebut BUMN perikanan menghadapi berbagai tantangan, dalam arti BUMN perikanan tidak hanya mampu melakukan dan memperhatikan internalisasai ke dalam, akan tetapi *net-working* dengan pihak luar. Oleh karena itu tantangan internal maupun eksternal yang dihadapi BUMN perikanan perlu direspon secara kelembagaan, individu maupun jejaring kerja.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada masa lalu menjadi salah satu pilar

ekonomi Indonesia, di samping badan usaha swasta. Pada saat perusahaan swasta besar bergelimpangan, BUMN diharapkan menjadi tulang punggung pemulihan ekonomi nasional. BUMN memiliki aspek penting yang tidak dimiliki oleh badan usaha swasta, yaitu adanya kepemilikan oleh Negara RI. Guna melihat bagaimana kinerja BUMN Perikanan maka tujuan penelitian ini adalah menganalisis kondisi keuangan (rasio kas, rasio lancar, rasio *leverage*, dan nilai solvabilitas) BUMN Perikanan yang bernama PT Perikanan Nusantara yang merupakan gabungan dari (PT Usaha Mina, PT Perikani, PT Tirta Raya Mina, dan PT Perikanan Samudra Besar).

METODE PENELITIAN

Teknik Analisis Data

Analisis keuangan memberikan ukuran bagi manajer mengenai bagaimana kinerja perusahaan dibandingkan dengan kinerjanya di tahun-tahun yang sebelumnya dan dengan kinerja pesaing (Pranoto, 2000). Kinerja finansial BUMN (Badan Usaha Milik Negara) Perikanan ditampilkan berdasarkan beberapa indikator yang biasa digunakan untuk penilaian oleh Kementerian BUMN. Aset BUMN dalam neraca keuangan merupakan aktiva yang terdiri dari aktiva lancar, aktiva tetap dan aktiva lain-lain. Dalam penelitian ini indikator yang digunakan adalah rasio kas, rasio lancar, rasio *leverage*, dan nilai solvabilitas.

Guna menghitung rasio kas diperlukan komponen harta yang terdiri dari kas, bank, deposito (Jusuf, 1996). Standar minimal dari rasio kas itu adalah 1 : 1. Jika rasio kas kurang dari 1, berarti aktiva lancar jauh lebih kecil ketimbang jumlah kewajiban yang membebani perusahaan. Jika nilai *Cash Ratio* semakin besar menunjukkan kondisi likuiditas semakin baik. Kewajiban lancar atau sering disebut juga utang lancar merupakan bagian dari kolom pasiva. Besar kecilnya utang lancar ini akan mencerminkan likuiditas dari perusahaan. Semakin besar rasio nilai utang lancar terhadap harta lancar, maka likuiditas perusahaan semakin kurang dan sebaliknya.

$$\text{CashRatio} = \frac{\text{Kas} + \text{SuratBerharga}}{\text{KewajibanLancar}} \times 100\%$$

Nilai solvabilitas merupakan perbandingan total aktiva dengan total hutang. Standar minimal dari nilai solvabilitas adalah 1 : 1. Berarti kemampuan perusahaan untuk membayar hutang dari harta yang dimiliki tidak sebanding, malah beban hutang jauh melebihi kemampuan perusahaan untuk mengembalikan beban utang tersebut. mengindikasikan perusahaan sangat tergantung pada utang.

$$\text{NilaiSolvabilitas} = \frac{\text{TotalAktiva}}{\text{TotalHutang}} \times 100\%$$

Rasio *Leverage* mengidentifikasi sumber modal perusahaan - pemilik atau kreditur luar (Jauch, 1997). Rasio ini merupakan ukuran dalam persentase dana total yang diperoleh dari pinjaman (utang). Rasio *leverage* yang lebih tinggi dari 0,5 biasanya dianggap aman hanya untuk perusahaan-perusahaan yang stabil. Rasio *leverage* adalah lebih besar 1 berarti, modal perusahaan sebagian besar berasal dari kreditur luar atau utang. Hal ini mengindikasikan perusahaan sangat tergantung pada utang.

$$\text{RatioLeverage} = \frac{\text{TotalKewajiban}}{\text{ModalSendiri}} \times 100\%$$

Dalam penelitian rasio likuiditas diwakili rasio lancar yang digunakan sebagai indikator kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Kewajiban ini meliputi utang lancar, termasuk utang jangka panjang yang telah jatuh tempo. Standar minimal rasio lancar itu adalah 2:1, dalam hal ini rasio kas PT Perikanan Nusantara berada jauh di bawah standar minimal rasio kas yaitu hanya 0,24. Berarti PT Perikanan Nusantara tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya, berupa utang lancar dan utang jangka panjang. mengindikasikan perusahaan sangat tergantung pada utang.

$$\text{RasioLancar} = \frac{\text{AktivaLancar}}{\text{HutangJangkaPendek}} \times 100\%$$

Sumber Data dan Cara Pengumpulan Data

Pada penelitian ini jenis data yang diambil adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diambil dari data yang berbentuk dokumen, laporan, dan publika-

si lainnya yang terkait dengan kebutuhan riset, seperti Neraca Keuangan, *Business Plan* Perusahaan, *Website* Meneg BUMN, dan lain-lain. Selain itu untuk memperkuat data sekunder juga dilakukan pengambilan data primer berupa hasil wawancara dengan pimpinan perusahaan dan *stake holder* lainnya seperti pihak pemerintahan daerah.

Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di BUMN Perikanan (PT Usaha Mina, PT Perikani, PT Tirta Raya Mina, dan PT Perikanan Samudra Besar).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rasio Kas

Rasio kas PT Perikanan Nusantara adalah 0,08, padahal standar minimal rasio kas itu adalah 1 : 1, dalam hal ini rasio kas PT Perikanan Nusantara berada di bawah standar minimal rasio kas yaitu hanya 0,08. Berarti aktiva lancar jauh lebih kecil ketimbang jumlah utang yang membebani perusahaan. Memang rata-rata kelemahan masing-masing cabang perusahaan dalam analisis SWOT adalah tingginya beban utang perusahaan yang tidak bisa dibayar, terutama utang kepada karyawan. Sebenarnya rasio kas salah satu *strategic business unit* PT Perikanan Nusantara ada yang lebih besar dari satu, yaitu PT Peri-

Perikanan Samudra Besar (PSB) memiliki saldo kas sebesar Rp 5.327.000.000. Dimana total pendapatan usaha sebesar Rp 40.900.000.000, total beban pokok sebesar Rp 36.243.000.000, saldo akhir sebesar Rp 9.894.000.000. Sedangkan untuk PT Usaha Mina memiliki modal Rp 9.220.000.000, pendapatan usaha sebesar Rp 65.674.000.000, beban usaha sebesar Rp 59.300.000.000, sedangkan saldo akhir sebesar Rp 15.594.000.000. PT Tirta Raya Mina (TRM) memiliki saldo kas sebesar Rp 50.000.000, dengan modal kerja sebesar Rp 840.000.000, pendapatan usaha sebesar Rp 5.373.000.000, beban usaha sebesar Rp 5.036.000.000, saldo akhir sebesar Rp 1.227. PT Perikani memiliki saldo kas sebesar Rp 16.000.000, modal kerja sebesar Rp 1.100.000.000, pendapatan usaha sebesar Rp 420.000.000, beban usaha sebesar Rp 401.000.000, dengan saldo akhir sebesar Rp 1.135.000.000.

Nilai Solvabilitas

Nilai solvabilitas PT Perikanan Nusantara adalah 0,53, padahal standar minimal rasio solvabilitas itu adalah 1 : 1, dalam hal ini rasio kas PT Perikanan Nusantara berada di bawah standar minimal rasio solvabilitas yaitu 0,53. Berarti kemampuan perusahaan untuk membayar hutang dari harta yang dimiliki tidak sebanding, malah beban hutang jauh melebihi kemampuan

Tabel 1
Nilai Rasio Kas Strategic Bisnis Unit PT Perikanan Nusantara

No	Nama Perusahaan	Nilai Rasio Kas
1	PT Perikanan Samudra Besar	1,735
2	PT Usaha Mina	0,008
3	PT Tirta Raya Mina	0,017
4	PT Perikani	0,004

Sumber: Data diolah, (2009)

ikanan Samudra Besar sebesar 1,74, tapi tiga perusahaan lainnya rasio kasnya jauh di bawah standar minimal yaitu PT Usaha Mina, PT Tirta Raya Mina, dan PT Perikani, dengan masing-masing nilai sebesar 0.008, 0.017, dan 0.004.

Memang rata-rata kelemahan masing-masing cabang perusahaan dalam analisis SWOT adalah tingginya beban utang perusahaan yang tidak bisa dibayar, terutama utang kepada karyawan. PT

perusahaan untuk mengembalikan beban utang tersebut. Sebenarnya rasio solvabilitas salah satu *strategic business unit* PT Perikanan Nusantara ada yang lebih besar dari satu, yaitu PT Perikanan Samudra Besar sebesar 4,09, tapi tiga perusahaan lainnya rasio kasnya jauh di bawah standar minimal yaitu PT Usaha Mina, PT Tirta Raya Mina, dan PT Perikani, dengan masing-masing nilai sebesar 0,37, 0,63, dan 0,61.

Nilai utang jangka panjang dari suatu perusahaan dapat digunakan sebagai indikator untuk mengetahui kemampuan kreditur dalam menyediakan dana dalam jangka panjang. Gambaran itu dapat diperoleh setelah dihitung rasionya terhadap modal saham perusahaan/BUMN. Rasio utang jangka panjang terhadap modal sa-

Rasio Lancar

Dalam penelitian rasio likuiditas diwakili rasio lancar yang digunakan sebagai indikator kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Kewajiban ini meliputi utang lancar, termasuk utang jangka panjang yang telah jatuh tempo.

Tabel 2
Nilai Rasio Solvabilitas Strategic Bisnis Unit PT Perikanan Nusantara

No	Nama Perusahaan	Nilai Rasio Solvabilitas
1	PT Perikanan Samudra Besar	4,093
2	PT Usaha Mina	0,374
3	PT Tirta Raya Mina	0,626
4	PT Perikani	0,604

Sumber: Data primer yang diolah (2009)

ham merupakan ukuran sejauh mana sumber pendanaan jangka panjang disediakan oleh kreditur. Dari data keuangan PT Perikanan Nusantara, diketahui bahwa kemampuan kreditur menyediakan pendanaan jangka panjang untuk BUMN cenderung menurun. Kondisi demikian mengindikasikan bahwa kegiatan BUMN Perikanan kurang mendapat dukungan dana dalam jangka panjang. Tapi saat penelitian ini di-

Standar minimal rasio lancar itu adalah 2:1, dalam hal ini rasio kas PT Perikanan Nusantara berada jauh di bawah standar minimal rasio kas yaitu hanya 0,24. Berrarti PT Perikanan Nusantara tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya, berupa utang lancar dan utang jangka panjang. Hutang itu meliputi hutang ke karyawan, hutang pajak dan hutang kepada pihak ketiga.

Tabel 3
Nilai Rasio Lancar Strategic Bisnis Unit PT Perikanan Nusantara

No	Nama Perusahaan	Nilai Rasio Lancar
1	PT Perikanan Samudra Besar	2,794
2	PT Usaha Mina	1,091
3	PT Tirta Raya Mina	0,375
4	PT Perikani	0,211

Sumber: Data primer yang diolah (2009)

lakukan, meningkat menjadi secara signifikan, hal ini disebabkan utang jangka panjang PT Usaha Mina meningkat menjadi Rp 55.818.000.000,00

Utang jangka pendek atau sering disebut juga utang lancar merupakan bagian dari kolom pasiva. Besar kecilnya utang lancar ini akan mencerminkan likuiditas dari perusahaan. Semakin besar rasio nilai utang lancar terhadap harta lancar, maka likuiditas perusahaan semakin kurang dan sebaliknya. Saat penelitian utang lancar meningkat menjadi Rp 146.463.000.000, hal ini disebabkan salah satu dari SBU PT Perikanan Nusantara, yaitu PT Usaha Mina Utang lancarnya mencapai Rp 126.448.000.000.

Rata-rata cabang perusahaan Perikanan didominasi oleh hutang kepada karyawan. Karena semakin besarnya rasio utang ini, maka kerjasama yang dilakukan dengan pihak lain seperti Korea dan Pemda untuk memperbaiki kondisi perusahaan ini dengan mengecualikan hutang. Diharapkan pembayaran utang tersebut dilakukan bila mendapatkan dana dari pemerintah. Memang ada juga hutang dagang dan bank seperti yang dialami Cabang Gorontalo yang memiliki hutang dagang sebesar Rp 1,8 milyar dan hutang bank sebesar Rp 1,3 milyar. Cabang Sorong memiliki hutang dagang diperkirakan Rp 26 miliar.

Sebenarnya rasio lancar salah satu *strategic business unit* PT Perikanan Nusantara ada yang lebih besar dari dua,

yaitu PT Perikanan Samudra Besar sebesar 2,79, tapi tiga perusahaan lainnya rasio kasnya jauh di bawah standar minimal yaitu PT Usaha Mina, PT Tirta Raya Mina, dan PT Perikani, dengan masing-masing nilai sebesar 1,091, 0.38, dan 0.21.

Rasio Leverage

Rasio Leverage mengidentifikasi sumber modal perusahaan - pemilik atau kreditur luar. Rasio ini merupakan ukuran dalam persentase dana total yang diperoleh dari pinjaman (utang). Rasio leverage

Gambaran Umum Perusahaan

Semenjak terjadi penggabungan empat BUMN Perikanan yaitu PT Perikanan Samudra Besar, PT Tirta Raya Mina, PT Usaha Mina, dan PT Perikani, menjadi sebuah buah BUMN yang bernama PT Perikanan Nusantara, dipegang oleh seorang acting director dan acting komisaris. Kalau perusahaan hasil penggabungan sudah mendapatkan persetujuan dari Departemen Kehakiman, maka akan ada direktur utama dan direktur lainnya, seperti direktur keuangan, pemasaran, produksi,

Tabel 4
Nilai Rasio Leverage Strategic Bisnis Unit PT Perikanan Nusantara

No	Nama Perusahaan	Nilai Rasio Solvabilitas
1	PT Perikanan Samudra Besar	0,24
2	PT Usaha Mina	2,67
3	PT Tirta Raya Mina	1,60
4	PT Perikani	1,90

Sumber: Data primer yang diolah (2009)

yang lebih tinggi dari 0,5 biasanya dianggap aman hanya untuk perusahaan-perusahaan yang stabil. Rasio leverage PT Perikanan Nusantara adalah sebesar 1,88. Berarti, modal perusahaan sebagian besar berasal dari kreditur luar atau utang. Hal ini mengindikasikan perusahaan sangat tergantung pada utang. Padahal kondisi perusahaan PT Perikanan Nusantara sendiri jauh dari stabil.

Untuk rasio *leverage* masing-masing cabang, Perikanan Samudra Besar sebesar 0,24, berarti dana total PT PSB dari utang sebesar 24 persen, cukup pantas selama ini hanya perusahaan ini yang cukup menguntungkan. Sedangkan rasio leverage PT Usaha Mina 2,67, berarti kondisi perusahaan ini sudah tidak stabil, karena komposisi dana total didominasi dari hutang. Demikian halnya dengan PT Tirta Raya Mina dan PT Perikani yang masing-masing rasio *leverage*-nya sebesar 1,6 dan 1,9. Pemerintah dalam hal ini Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara sepatnya memberikan suntikan modal yang akan digunakan untuk penyelesaian utang perusahaan kepada karyawan atau pihak lainnya. Karena utang ini cukup memberatkan beban perusahaan yang totalnya sebesar Rp 202.282.000.000,00

dan direktur lainnya, termasuk komisaris perusahaan. Sebelum digabung tanggal 27 Oktober 2005 struktur organisasi BUMN masing-masing *strategic business unit* memiliki struktur organisasi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya (Perikanan Nusantara, 2006).

Semenjak digabung PT Perikanan Nusantara menghadapi masalah dalam hal sumber daya manusia. Hal ini terkait dengan utang perusahaan kepada karyawan yang belum terbayarkan. Namun, sebelumnya PT PSB didukung oleh sekitar 531 karyawan meliputi karyawan Laut dan daratan dengan jumlah masing-masing 302 orang dan 229 orang. Dari jumlah tenaga kerja 561 orang tersebut, sebanyak 68 orang berstatus pegawai honorarium dan 493 orang termasuk pegawai negeri definitif. Karyawan PT PSB tersebar di semua kan tor cabang PT PSB, namun jumlah karyawan yang terbesar berada di Benoa, Bali yang merupakan basis kegiatan PT PSB. Jumlah karyawan yang berada di Benoa Bali, terdapat 465 orang. Jumlah karyawan paling sedikit terdapat di Cabang Sabang, yakni hanya 11 Orang.

Pada awal berdirinya Perusahaan BUMN Perikanan menyediakan sarana dan prasarana yang terdapat pada masing-masing unit usaha sangat lengkap untuk melaksanakan kegiatan operasional perusa-

haan. Kelengkapan sarana dan prasarana tergantung pada lini usaha yang dijalankan. Untuk PT. Perikanan Samodra Besar, lini usaha yang dijalankan meliputi penangkapan, pengolahan, perdagangan, jasa docking dan coldstorage. Lini usaha yang dijalankan oleh PT. Usaha Mina hampir mirip dengan yang dilakukan oleh PT. PSB yaitu kegiatan penangkapan, pengolahan, perdagangan, jasa cold storage dan perbengkelan. Namun dalam menjalankan kegiatan

melalui koperasi, nelayan, pedagang, atau dari internal (kapal sendiri) dan pedagang pengumpul. Seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini:

Pembeli

Pembeli produk dari PT Perikanan Nusantara tergantung pada masing-masing strategic business unit. Pada umumnya pembeli berasal dari pasar dalam negeri dan pasar luar negeri. Namun kedepannya pasar diarahkan ke pasar ekspor, dengan

Tabel 5
Kekuatan Persaingan (Pemasok) Strategic Bisnis Unit PT Perikanan Nusantara

No	SBU	Pemasok
1	PT Perikanan Samudra Besar	Internal (kapal sendiri)
2	PT Tirta Raya Mina	Pedagang besar
3	PT Usaha Mina	Inti plasma
4	PT Perikani	Nelayan atau pedagang

Sumber: Data diolah primer yang diolah (2009)

penangkapan, PT. Usaha Mina menerapkan Pola Inti Plasma. PT. Tirtaraya Mina merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan dan perdagangan serta jasa cold storage dan perbengkelan. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PT. Perikani Aertembaga meliputi tujuh unit kapal, yang sesuai dengan lini usaha yang dijalankan meliputi pengolahan, perdagangan, jasa cold storage dan perbengkelan (*docking*).

Pokok perumusan strategi bersaing adalah menghubungkan perusahaan dengan lingkungannya. Intensitas persaingan dalam suatu industri bukanlah masalah kebetulan atau nasib buruk. Sebaliknya, persaingan dalam suatu industri berakar pada struktur ekonomi yang mendasarinya. Keadaan persaingan dalam suatu industri tergantung pada kekuatan persaingan yaitu: pemasok, pembeli, pesaing, pendatang baru.

Pemasok

Pemasok dapat menggunakan kekuatan tawar menawar terhadap para peserta industri dengan mengancam akan menaikkan harga atau menurunkan mutu produk atau jasa yang dibeli. Pemasok dari PT Perikanan Nusantara adalah inti plasma

alasan harga ikan ekspor lebih tinggi dibanding harga dalam negeri. Untuk pasar dalam negeri misalnya, 1 kg ikan tuna harganya Rp 20.000, sedangkan untuk pasar luar negeri harganya bisa mencapai 5 US\$/kg.

Pesaing

Pada kebanyakan industri, gerakan persaingan oleh suatu perusahaan mempunyai pengaruh yang besar terhadap para pesaingnya (Rangkuti, 1998). Di Industri perikanan PT Perikanan Nusantara merupakan follower, dengan pesaing: Pertama, PT. Dharma Samudera Fishing Industries jenis usaha yang akan dikembangkan adalah industri galangan kapal (*docking workshop* dan *dermaga*), industri pengolahan dan pembekuan ikan yang dengan negara tujuan ekspor Jepang dan Amerika Serikat. Kedua, PT. Sultra Tuna Samudera jenis usaha yang dikembangkan untuk penangkapan ikan cakalang dan pengumpulan ikan segar dengan kapasitas 10 ton/hari dengan negara bagian ekspor Jepang. Ketiga, PT. Jayanti Group dengan jenis usaha penangkapan ikan dan pengumpulan ikan yang berkapasitas 30 ton/hari. Negara bagian ekspor Jepang dan Taiwan. Keempat, PT. Yanagi Histalaraya dengan usaha pen-

gumpulan ikan, udang, cumi-cumi, gurita dan rajungan dengan kapasitas 2,5 ton/hari. Negara tujuan ekspor Jepang.

Pendatang Baru

Pendatang pada suatu industri membawa kapasitas baru, keinginan untuk merebut bagian pasar. Akibatnya bisa membuat harga turun atau pembengkakan biaya yang mengurangi tingkat laba yang dihasilkan sebuah perusahaan. Pada umumnya industri perikanan tuna mengalami pertumbuhan yang melambat. Pertumbuhan yang melambat disebabkan karena kenaikan bahan bakar minyak dan semakin banyaknya pesaing tapi tidak diimbangi stock ikan. Penangkapan ikan tuna yang dimiliki PT Perikanan Samodra Besar membuktikan penurunan itu. Kalau dilihat dari hook rate (beberapa ekor yang ditangkap dalam 100 pancing), angka yang tertinggi dicapai yakni 2,16, namun sekarang menyusut lagi menjadi 0,67.

SIMPULAN DAN SARAN

Hasil analisis mengindikasikan, dari sisi rasio kas PT Perikanan Nusantara adalah 0,08, padahal standar minimal rasio

kas itu adalah 1 : 1, dalam hal ini rasio kas PT Perikanan Nusantara berada di bawah standar minimal rasio kas yaitu hanya 0,08. Dari sisi nilai solvabilitas PT Perikanan nusantara adalah 0,53, padahal standar minimal rasio solvabilitas itu adalah 1 : 1, dalam hal ini rasio kas PT Perikanan Nusantara berada di bawah standar minimal rasio solvabilitas, berarti kemampuan perusahaan untuk membayar hutang dari harta yang dimiliki tidak sebanding. Begitupun dari sisi standar minimal rasio lancar yang seharusnya adalah 2 : 1, dalam hal ini rasio lancar PT Perikanan Nusantara berada jauh di bawah standar minimal rasio lancar yaitu hanya 0,24. Berarti PT Perikanan Nusantara tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya, berupa utang lancar dan utang jangka panjang. Ketergantungan terhadap utang ini bisa dilihat dari sisi rasio leverage PT Perikanan Nusantara yang sebesar 1,88. Berarti, modal perusahaan sebagian besar berasal dari kreditur luar atau utang. Hal ini mengindikasikan perusahaan sangat tergantung pada utang. Padahal kondisi perusahaan PT Perikanan Nusantara sendiri jauh dari stabil.

DAFTAR PUSTAKA

- Abeng, T. (2002), *Dari Meja Tanri Abeng. Gagasan, Wawasan, Terapan dan Renungan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Bastian, I. (2002), *Privatisasi di Indonesia: Teori dan Implementasi*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Jauch, Lawrence R., and William F., Glueck, (1997), *Manajemen Strategis dan Kebijakan Perusahaan*, Edisi Ketiga, Alih Bahasa Murad dan Henry Sitanggang, Erlangga, Jakarta
- Jusuf, J. (1996), *Analisis Kredit untuk Account Officer*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Pranoto T. (2000), "Quo Vadis Corporate Governance", *Manajemen Usahawan Indonesia*. No. 08/TH.XXIX Agustus.
- PT. Perikanan Nusantara Persero (2006), *Business Plan PT Perikanan Nusantara*, Jakarta
- Rangkuti, F. (1998), *Analisis SWOT. Teknik Membedah Kasus Bisnis*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.